

## **BAB XI**

### **REVITALISASI PERTANIAN**

Revitalisasi pertanian dalam arti luas dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran penciptaan lapangan kerja, terutama di pedesaan, dan mengentas masyarakat miskin, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Revitalisasi pertanian mengandung arti sebagai kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual. Dalam arti menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan dengan tanpa mengabaikan sektor lainnya.

Sektor pertanian, yang mencakup tanaman bahan makanan, peternakan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, menyerap sekitar 63% tenaga kerja dari total angkatan kerja Jawa Timur tahun 2008, dan memberikan kontribusi sebesar 16,89% dari PDRB Jawa Timur, atau terbesar ketiga setelah perdagangan, hotel dan restoran (29,36%), dan industri pengolahan (28,49%). Sektor pertanian juga berperan besar dalam penyediaan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam rangka memenuhi hak atas pangan. Namun secara umum tingkat pendapatan penduduk di sektor ini relatif lebih rendah dibandingkan pendapatan penduduk di sektor industri pengolahan maupun jasa.

Pengembangan sektor pertanian sesuai potensi wilayah merupakan ujung tombak terpenting dalam mendorong pembangunan ekonomi. Pengembangan pusat-pusat industri berbasis pertanian di berbagai daerah sebagai bagian dari sistem pertanian modern akan mendorong pengembangan sektor pertanian dengan seluruh sub-sektornya, dan sektor-sektor lain yang terkait, yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama lima tahun terakhir (2003-2007) masih dipengaruhi oleh sektor industri dan sektor perdagangan.

Daya saing produk pertanian yang relatif rendah menjadi alasan utama pentingnya efisiensi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi produk-produk pertanian, terutama yang mempunyai potensi strategis untuk dikembangkan dalam sistem agrobisnis dan agropolitan. Selain itu, efisiensi di sektor pertanian akan mengakibatkan terjadinya surplus tenaga kerja di pedesaan, sehingga memerlukan perluasan peluang kerja di sektor pertanian.

Namun dampak krisis ekonomi global juga mengakibatkan terjadinya surplus tenaga kerja di sektor non-pertanian akibat gelombang besar pemutusan hubungan

kerja

kerja (PHK), yang makin memperberat beban sektor pertanian, karena mereka mengalihkan sumber nafkahnya ke sektor pertanian. Situasi ini menjadi semakin kompleks, karena tidak mungkin melakukan ekstensifikasi pertanian di Jawa Timur. Sumber daya lahan untuk produksi pertanian relatif makin terbatas, akibat kian meluasnya perubahan fungsi dan tata guna lahan dari sektor pertanian ke non-pertanian. Luas rata-rata pemilikan lahan sawah hanya sekitar 0,3 hektare per rumah tangga petani. Jumlah petani gurem juga terus meningkat dari tahun ke tahun.

Luas panen tanaman padi dan palawija cenderung menurun selama 2003-2007, kecuali padi, kacang tanah dan kedelai. Tanaman padi yang memiliki areal panen terluas dibandingkan tanaman pangan lainnya, yaitu 1.695.514 hektare pada 2004, dan 1.750.903 hektar pada 2007, menghasilkan 8.914.995 ton gkp pada 2004, dan 9.346.947 ton gkp pada 2007. Sementara tanaman yang dihasilkan sub-sektor hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan berfluktuasi, areal panen dan jumlah produksinya tergantung pada musim dan permintaan konsumen.

Meski sektor pertanian masih mempunyai banyak kendala, seperti kendala modal dan bahan baku, teknologi, dan pemasaran, namun perannya dalam menyerap tenaga kerja di saat perekonomian mengalami krisis sudah terbukti. Karena itu, menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur, dengan menyegarkan kembali vitalitasnya, memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerjanya menuju pengembangan agropolitan dan agrobisnis, mutlak diperlukan, sekaligus sebagai upaya mengentas masyarakat miskin. Apalagi, wilayah-wilayah di Jawa Timur terkonsentrasi pada komoditas pertanian yang khas, dan mengalami surplus.

Pembangunan pertanian --yang mencakup sub-sektor tanaman bahan makanan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan-- harus merupakan *holistic policy*, baik secara vertikal maupun horizontal. Untuk itu, dibutuhkan integrasi maupun sinkronisasi program, baik antar-tingkatan pemerintahan maupun koordinasi antar-lembaga/unit satuan kerja dan dunia usaha beserta organisasi profesi lainnya.

## **XI.1 Permasalahan**

### **a. Rendahnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan**

Tingkat kesejahteraan masyarakat petani, antara lain, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Pada 2008, rata-rata NTP mencapai 114,15, mengalami kenaikan hanya 0,91% dari NTP tahun sebelumnya yang 113,12. Kenaikan tersebut disebabkan kenaikan indeks harga yang diterima

petani

petani (14,40%) lebih besar daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani (13,36%). Namun NTP pada bulan Maret dan Desember 2008 lebih rendah dibandingkan bulan yang sama pada 2007.

Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) selama tahun 2008 berfluktuasi. Jika dibandingkan tahun 2007, kenaikan NTN 2008 cukup tinggi. Apabila dilihat nilainya, NTN selama tahun 2008 sudah jauh berada pada level di atas 100. Ini menunjukkan, perkembangan harga yang diterima nelayan lebih tinggi daripada perkembangan harga yang dibayar nelayan. Namun perkembangan harga yang tinggi tidak otomatis membuat pendapatan nelayan meningkat, karena hanya dinikmati sebagian kecil nelayan yang memiliki armada dan alat penangkapan ikan yang lebih baik dan modern, sementara para nelayan tradisional tidak dapat menikmati kenaikan harga tersebut.

Meski kontribusi sektor pertanian secara keseluruhan terhadap PDRB Jawa Timur menempati posisi tiga besar, namun kesejahteraan petani dan nelayan masih relatif rendah. Sekitar 70%-80% kelompok masyarakat ini termasuk golongan miskin, dengan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan yang masih tradisional, dan bersifat subsisten. Buruh tani dan nelayan merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai pendapatan rata-rata paling rendah, dan merupakan kelompok terbesar dari jumlah penduduk miskin Jawa Timur. Minimnya akses terhadap informasi dan sumber permodalan, menyebabkan masyarakat petani/nelayan, dan masyarakat pesisir tidak dapat mengembangkan usahanya secara layak ekonomi.

#### **b. Lemahnya Kelembagaan dan Posisi Tawar Petani**

Kelembagaan petani yang lemah, karena rendahnya kualitas sumber daya manusia petani dan nelayan, ditambah tidak ada atau tidak berfungsinya lembaga petani dan lembaga pendukung pertanian di pedesaan, membuat posisi tawar petani menjadi lemah, dan mempersulit dukungan pemerintah yang diberikan kepada petani.

Lembaga petani yang dapat menjadi sarana meningkatkan skala usaha untuk memperkuat posisi tawar petani sudah banyak yang tidak berfungsi. Lembaga pendukung untuk petani, terutama lembaga penyuluhan pertanian, sudah kurang berfungsi sehingga menurunkan efektivitas pembinaan, dukungan dan diseminasi teknologi dalam rangka meningkatkan penerapan teknologi dan efisiensi usaha petani.

Selain itu, dengan berkembangnya otonomi daerah, semakin banyak peraturan daerah yang menghambat arus pemasaran komoditas, baik *input* produksi

maupun

maupun *output*/hasil produksi. Kondisi ini melahirkan sistem pemasaran yang merugikan petani produsen, karena mereka berada pada posisi paling lemah.

#### **b. Sempitnya Lahan Pengusahaan Petani**

Terdapat kecenderungan jumlah petani dalam kurun 2003-2008 meningkat, karena dalam setiap kejadian krisis ekonomi, sektor pertanian selalu menjadi alternatif penyelamat ekonomi keluarga. Namun di lain pihak, konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian juga meningkat tajam dari tahun ke tahun, bahkan banyak lahan sawah produktif berubah menjadi lahan industri dan permukiman. Menurunnya jumlah lahan pertanian mengakibatkan rata-rata pemilikan lahan pertanian menyempit menjadi rata-rata di bawah 0,3 hektare per rumah tangga petani.

Dengan luas lahan usaha tani seperti ini, meski produktivitas per luas lahan tinggi, tidak dapat memberi pendapatan yang cukup untuk menghidupi rumah tangga petani, dan pengembangan usaha mereka. Hal ini merupakan tantangan besar dalam mengamankan produksi padi/beras dalam negeri untuk mendukung ketahanan pangan nasional, dan peningkatan daya saing komoditas pertanian.

#### **c. Terbatasnya Akses Petani dan Nelayan ke Sumber Daya Produktif**

Lemahnya akses terhadap permodalan, dan terbatasnya kepemilikan sarana produksi pertanian merupakan salah satu penyebab kurang berkembangnya sektor pertanian. Cara-cara tradisional dan konvensional yang digunakan dalam berusaha tani menyebabkan pendapatan yang diterima dari usaha tani relatif rendah. Akibatnya petani sulit menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk mengakumulasi modal dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana produksi pertanian.

Dukungan kredit usaha pertanian untuk kebutuhan modal petani dan nelayan masih terbatas. Sementara, jumlah kredit perbankan yang teralokasikan untuk usaha perikanan hanya sekitar 0,02% dari total kredit. Keterbatasan modal membuat petani dan nelayan kurang tertarik menerapkan teknologi baru dalam meningkatkan produktivitas, juga membatasi peningkatan nilai tambah, dan mengakibatkan ketergantungan pada penyediaan modal informal (pengijon/rentenir). Di samping itu, keterbatasan penyediaan sarana produksi, termasuk upaya pengendalian hama dan penyakit, serta bencana alam banjir dan kekeringan yang setiap tahun berulang terjadi, juga mengganggu produktivitas pertanian.

Akses petani dan nelayan terhadap prasarana dan sarana transportasi juga menghambat pemasaran produk pertanian dan perikanan yang bersifat *bulky* dan mudah rusak, sehingga mereka terpaksa menerima harga (*price-taker*), bahkan

menekan

menekan harga produk. Hal ini antara lain disebabkan belum berpihaknya kebijakan ekonomi makro kepada petani, dan lemahnya koordinasi antar-lembaga.

**d. Rendahnya Sistem Alih Teknologi dan Diseminasi Teknologi Pengolahan**

Pertumbuhan sub-sektor perkebunan, peternakan dan perikanan menunjukkan perkembangan menggembirakan, namun nilai tambah komoditas ini masih rendah, karena umumnya ekspor dilakukan dalam bentuk segar (produk primer), dan olahan sederhana. Sistem penyuluhan pertanian juga berjalan kurang optimal, sehingga menghambat transfer teknologi.

Perkembangan industri hasil pertanian dan perikanan belum optimal, yang ditunjukkan oleh rendahnya tingkat utilisasi industri hasil pertanian dan perikanan. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan melalui proses pengolahan memerlukan investasi dan teknologi pengolahan lebih modern. Kondisi ini diperberat oleh semakin tingginya persaingan produk dari luar negeri, baik yang masuk melalui jalur legal maupun ilegal.

**d. Infrastruktur Pertanian Kurang Memadai**

Sekitar 30% jaringan irigasi terutama, di daerah-daerah penghasil beras berada dalam kondisi rusak, terutama disebabkan rendahnya kualitas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Alih fungsi lahan beririgasi pada daerah lumbung pangan cenderung meluas, sehingga secara terus menerus dan signifikan mengurangi areal lahan beririgasi.

Kondisi infrastruktur yang kurang memadai akan mempengaruhi kinerja sektor pertanian. Karena itu, perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian dan pedesaan merupakan tantangan strategis dalam pembangunan Jawa Timur.

**e. Belum Optimalnya Usaha Perikanan Budidaya**

Pada umumnya usaha perikanan budidaya masih belum menggunakan teknologi budidaya yang tepat dan ramah lingkungan secara terintegrasi (*integrated aquaculture*), sehingga pola pengembangan budidaya, khususnya dalam proses produksi, masih belum efisien. Umumnya budidaya perikanan hanya difokuskan pada komoditas unggulan tanpa diikuti pengembangan komoditas lain yang akan memanfaatkan limbahnya, bahkan sekaligus dapat mempertahankan kualitas air.

Akibatnya, produksi maupun produktivitas usaha budidaya perikanan yang dilakukan para pembudidaya menjadi rendah. Di samping itu, yang sering menjadi masalah dalam budidaya perikanan adalah penyediaan benih, bahan baku pakan, sarana irigasi (tambak), belum jelasnya pengaturan tata ruang budidaya, kurangnya

pembinaan

pembinaan dan penyuluhan/pendampingan, dan masalah-masalah lain yang berkaitan akses modal dan pemasaran.

**f. Kesenjangan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan**

Ketimpangan tingkat pemanfaatan stok ikan antar-kawasan perairan laut menyebabkan kondisi *overfishing* di kawasan tertentu, sebaliknya masih banyak kawasan perairan laut yang tingkat pemanfaatan sumber daya ikannya belum optimal, atau bahkan belum terjamah sama sekali.

Ketimpangan ini mengakibatkan terakumulasinya sejumlah besar nelayan di wilayah-wilayah tersebut, sehingga berakibat pada menurunnya jumlah tangkapan, semakin kecilnya ukuran ikan, menurunnya jumlah spesies, yang akhirnya berdampak pada menurunnya pendapatan nelayan.

Sementara itu, telah pula terjadi kerusakan lingkungan ekosistem laut dan pesisir, seperti kerusakan hutan mangrove, terumbu karang dan padang lamun di mana kawasan ini sebagai tempat (habitat) penting ikan dan organisme laut lainnya berpijah, mencari makan, atau membesarkan diri (*nursery ground*). Kerusakan lingkungan pesisir dan laut ini juga disebabkan pencemaran, baik yang berasal dari kegiatan manusia di darat maupun di laut.

**XI.2 Sasaran**

Sasaran revitalisasi pertanian adalah meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian secara signifikan, dan meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan, serta berkembangnya agrobisnis/agroindustri dan agropolitan. Secara rinci, sasaran tersebut adalah:

1. Meningkatnya secara nyata pendapatan petani dan nelayan, terutama dari keluarga miskin, yang tercermin dari meningkatnya Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan.
2. Meningkatnya investasi, dan perluasan lapangan kerja --bagi laki-laki maupun perempuan-- di sektor pertanian.
3. Meningkatnya produksi dan ekspor hasil pertanian dan perikanan.
4. Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan.
5. Tersedianya infrastruktur pertanian dan pedesaan yang memadai.
6. Meningkatnya pengembangan agroindustri/agrobisnis, dan pembentukan kawasan agropolitan, terutama di kawasan kantong kemiskinan.
6. Meningkatnya produksi beras untuk pengamanan kemandirian pangan.

7. Makin optimalnya pengelolaan sumber daya kelautan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
8. Meningkatnya kemampuan petani dan nelayan mengelola sumber daya alam secara lestari dan bertanggung jawab.
9. Makin optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kehutanan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

### **XI.3 Arah Kebijakan**

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, revitalisasi pertanian ditempuh melalui empat langkah pokok, yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan petani, dan penguatan lembaga pendukungnya, dengan kebijakan yang diarahkan pada:
  - a. Revitalisasi penyuluhan dan pendampingan petani, termasuk peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan.
  - b. Menghidupkan dan memperkuat lembaga pertanian dan pedesaan untuk meningkatkan akses petani dan nelayan --laki-laki maupun perempuan-- terhadap sarana produktif, membangun *delivery system* dukungan pemerintah untuk sektor pertanian, dan meningkatkan skala perusahaan yang dapat meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan.
  - c. Meningkatkan kemampuan/kualitas sumber daya manusia pertanian.
2. Meningkatkan produktivitas, produksi, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan, dengan kebijakan yang diarahkan pada:
  - a. Mengembangkan usaha pertanian menggunakan pendekatan kewilayahan terpadu, dengan konsep pengembangan kawasan agropolitan dan agrobisnis, yang akan meningkatkan kelayakan pengembangan/skala ekonomi, sehingga lebih meningkatkan efisiensi dan nilai tambah, serta mendukung pembangunan pedesaan dan perekonomian daerah.
  - b. Menyusun langkah-langkah peningkatan daya saing produk pertanian dan perikanan, misalnya dorongan dan insentif untuk peningkatan pasca-panen, serta pengolahan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan keamanan pangan, melindungi petani dan nelayan dari persaingan yang tidak sehat.
  - c. Memperkuat sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengelola risiko usaha pertanian, serta untuk mendukung pengembangan agroindustri,

Dan pembangunan

dan pembangunan kawasan agropolitan.

- d. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya perikanan dalam mendukung ekonomi, dan tetap menjaga kelestariannya, melalui:
  1. Menata dan memperbaiki lingkungan perikanan budidaya.
  2. Menata industri perikanan dan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir.
  3. Memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap.
  4. Mengembangkan perikanan samudera dan bioteknologi perikanan.
  5. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya perikanan.
  6. Meningkatkan kualitas pengolahan dan nilai tambah produk perikanan melalui pengembangan teknologi pasca-tangkap/panen.
  7. Percepatan peningkatan produk perikanan budidaya.
  8. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, penyuluh, dan pendamping perikanan.
  9. Perkuatan sistem kelembagaan, koordinasi dan pengembangan peraturan perundangan sebagai instrumen penting untuk mempertegas pengelolaan sumber daya perikanan yang ada.
3. Meningkatkan pengamanan ketahanan pangan, dengan kebijakan yang diarahkan pada:
  - a. Mempertahankan tingkat produksi beras dengan ketersediaan minimal yang cukup untuk mendukung kemandirian pangan.
  - b. Meningkatkan ketersediaan pangan ternak dan ikan dari dalam negeri. Kebijakan pengembangan peternakan diarahkan untuk meningkatkan populasi hewan dan produksi pangan hewani dari produksi dalam negeri agar ketersediaan dan keamanan pangan hewani dapat lebih terjamin untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
  - c. Melakukan diversifikasi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras, dengan konsumsi pangan alternatif berbahan lokal.
4. Memanfaatkan hutan untuk diversifikasi usaha, dan mendukung produksi pangan, dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan hutan alam dan pengembangan hutan tanaman, dan hasil hutan non-kayu secara berkelanjutan dengan kebijakan yang diarahkan pada:

a.Meningkatkan



- a. Meningkatkan nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu.
- b. Pemberian insentif pengembangan hutan tanaman industri (HTI).
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat luas dalam pengembangan hutan tanaman.
- d. Meningkatkan produksi hasil hutan non-kayu untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

#### **XI.4 Program**

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program-program pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu program prioritas dan penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

##### **XI.4.1 Program Prioritas**

###### **a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat pertanian, terutama petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumber daya usaha pertanian.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Pengembangan upaya pengentasan masyarakat miskin di kalangan petani dan nelayan, laki-laki maupun perempuan.
2. Pengembangan kredit usaha berbasis pertanian bagi kelompok miskin di pedesaan, dan pembentukan lembaga keuangan mikro untuk melayani kebutuhan modal usaha penduduk miskin.
3. Pemberdayaan usaha rakyat berbasis pertanian melalui akses permodalan (pinjaman lunak) dengan agunan aktivitas usaha itu sendiri
4. Pengembangan kredit usaha mikro tanpa agunan bagi petani dan buruh tani perempuan untuk mewujudkan kemandirian perempuan secara ekonomi.
5. Penyederhanaan mekanisme dukungan kepada petani dan nelayan, serta pengurangan hambatan usaha pertanian.
6. Perlindungan terhadap petani dari persaingan usaha yang tidak sehat dan perdagangan yang tidak adil.
7. Penumbuhan dan penguatan lembaga pertanian dan pedesaan untuk meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan.
8. Perbaikan sistem dan mekanisme distribusi pupuk bersubsidi mengantisipasi

secara

secara dini kelangkaan pupuk berulang pada setiap musim tanam.

9. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia petani garam rakyat, dan penguatan lembaga pendukungnya untuk meningkatkan posisi tawar petani garam.
10. Mendorong perkembangan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbasis rakyat/komunitas, dan dikelola sebagai usaha bersama dari, oleh, dan untuk rakyat, melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal.

**b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan**

Program ini bertujuan memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Pemantapan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, daerah dan wilayah, melalui pengembangan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah, serta pengembangan desa mandiri pangan.
2. Pengamanan ketersediaan pangan antara lain melalui pencegahan konversi lahan sawah di daerah irigasi, dan peningkatan mutu intensifikasi pertanian.
3. Peningkatan distribusi pangan, melalui penguatan kapasitas kelembagaan pangan, dan peningkatan infrastruktur pertanian dan pedesaan yang mendukung sistem distribusi pangan, untuk menjamin keterjangkauan masyarakat atas pangan.
4. Peningkatan pasca-panen dan pengolahan hasil melalui optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian, pengembangan dan pemanfaatan teknologi pertanian tepat guna untuk menurunkan kehilangan hasil.
5. Diversifikasi pangan, dan perekayasaan sosial pola konsumsi masyarakat menuju pola pangan dengan mutu makin meningkat, serta peningkatan minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif/pangan lokal.
6. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, melalui peningkatan bantuan pangan kepada keluarga miskin/rawan pangan, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, serta pengembangan sistem antisipasi dini terhadap kerawanan pangan.

**c. Program Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis**

Program ini bertujuan memfasilitasi pengembangan usaha agrobisnis yang mencakup usaha di bidang pertanian hulu, *on farm* (budi daya), hilir (agroindustri), dan usaha jasa pendukungnya yang kuat dan terpadu. Agrobisnis lebih ditekankan

pada

pada kegiatan perdagangan, sedangkan agroindustri merupakan kegiatan pengolahan hasil pertanian.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan di tingkat petani melalui peningkatan penanganan pasca-panen, mutu, pengolahan hasil dan pemasaran, serta pengembangan agroindustri di pedesaan.
2. Pengembangan diversifikasi usaha tani, melalui pengembangan usaha tani dengan komoditas bernilai tinggi dan unggulan, serta pengembangan kegiatan *off-farm* untuk meningkatkan pendapatan dan nilai tambah.
3. Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif, terutama permodalan, melalui pengembangan lembaga keuangan pedesaan dan sistem pendanaan yang layak bagi usaha pertanian, antara lain pengembangan dan penguatan lembaga keuangan mikro, insentif permodalan, dan pengembangan pola-pola pembiayaan yang layak dan sesuai bagi usaha pertanian.
4. Pengembangan industri yang memadukan kegiatan pertanian dan non-pertanian di pedesaan.
5. Pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian dan pedesaan, melalui perbaikan jaringan irigasi dan jalan usaha tani, pasar tani, serta infrastruktur pedesaan lainnya, seperti transportasi, listrik, air, komunikasi.
6. Pengembangan kemudahan perijinan investasi pada berbagai mata-rantai agrobisnis, mulai dari budi daya, pasca-panen, pengolahan, dan pemasarannya, dan usaha perdagangan berskala kecil dan menengah.
7. Pengembangan iklim usaha yang kondusif dan sehat bagi peningkatan investasi di bidang agrobisnis/agroindustri dengan menghilangkan beban biaya yang tidak perlu bagi investor.
8. Fasilitasi pengembangan agrobisnis melalui kemitraan masyarakat petani dan pemilik modal sebagai wujud *corporate social responsibility* (CSR) untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak.
9. Pengembangan jejaring perdagangan untuk mendorong pengembangan pasar yang efisien bagi produk-produk pertanian yang dihasilkan, dan berkeadilan, serta untuk meningkatkan potensi strategis perdagangan produk-produk pertanian unggulan, termasuk pengembangan terminal/sub-terminal agrobisnis, dan pusat lelang hasil pertanian.
10. Fasilitasi pembentukan jaringan agrobisnis yang mensinergikan antar-koperasi, antar-Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) maupun antar-institusi bisnis berbasis

pertanian

pertanian yang terkait langsung maupun tidak langsung.

11. Pembentukan *clearing-houses* di bidang agrobisnis untuk mengatasi ketidakseimbangan pasar maupun kegagalan pasar pada aktivitas pertanian dan agrobisnis melalui sistem informasi pasar yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
12. Pengurangan hambatan perdagangan antar-wilayah, dan perlindungan dari sistem perdagangan tidak adil.
13. Pengembangan fungsi stabilitasi, selain alokasi dan distribusi, dalam kebijakan fiskal (APBD) dengan membelanjakan anggaran yang optimal untuk mendorong dan menciptakan permintaan terhadap produk-produk agrobisnis melalui konsumsi publik, yang meningkatkan produksi pertanian, dan produk turunannya, sehingga mendorong perluasan lapangan kerja.
14. Pengembangan kawasan sentra pembibitan pertanian di pedesaan.
15. Pengembangan agroindustri dan agrobisnis padat karya untuk memperluas lapangan kerja bagi masyarakat lokal, terutama penduduk miskin.
16. Fasilitasi pengembangan dan pembangunan pabrik gula mini.

**d. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan**

Program ini bertujuan memfasilitasi pengembangan dan pemantapan kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan lokal yang dikembangkan melalui mata rantai agrobisnis hulu, *on farm* (budi daya), hilir (agroindustri), dan usaha jasa pendukungnya yang kuat dan terpadu.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Pemantapan dan pengembangan kawasan agropolitan yang strategis dan potensial, melalui pembentukan klaster komoditas unggulan yang berpotensi ekspor.
2. Identifikasi potensi wilayah yang layak dikembangkan menjadi kawasan agropolitan, dengan memperhitungkan komoditas unggulan yang dimiliki, keterkaitan dengan *hinterland* (*backward linkage*), dan *forward linkage*-nya.
3. Fasilitasi daerah untuk mengembangkan kawasan atau klaster agropolitan berbasis potensi, dengan mengembangkan produk unggulan spesifik dan kompetitif melalui pemberian bantuan teknis dan pendampingan, serta berbagai insentif yang mendorong pertumbuhan kawasan tersebut.
4. Pengembangan dan pembangunan jaringan infrastruktur pertanian dan pedesaan pendukung kawasan agropolitan, termasuk pengembangan teknologi

informatika

informatika dan telekomunikasi.

5. Pengembangan pelayanan lembaga keuangan, baik lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan, termasuk lembaga keuangan mikro kepada pelaku usaha pertanian di pedesaan.
6. Peningkatan daya tarik investasi ke kawasan agropolitan, dengan pemberian insentif dan kemudahan perijinan.
7. Pengembangan kemitraan antara pelaku usaha besar dan usaha mikro/rumah tangga, kecil dan menengah berbasis komoditas unggulan agropolitan.
8. Peningkatan peran perempuan, terutama penduduk miskin, dalam kegiatan usaha ekonomi produktif di kawasan agropolitan.
9. Perluasan jaringan pasar dan pusat-pusat bisnis, serta peningkatan promosi produk-produk agropolitan.
10. Penyusunan desain dan implementasi sistem pengembangan *social capital* dan *human capital* yang menunjang agropolitan, melalui kemitraan dengan berbagai institusi yang ada pada masyarakat setempat.
11. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di pedesaan agar mampu menjadi pendukung dan pengembang agropolitan berdasarkan potensi pertanian yang ada di masing-masing daerah.
12. Penguatan rantai pasokan bagi industri pedesaan, dan penguatan keterkaitan produksi berbasis sumber daya lokal, baik sumber daya alam maupun manusia.
13. Pengembangan, penerapan, pemanfaatan dan pemasyarakatan ilmu dan teknologi tepat guna dalam kegiatan usaha ekonomi masyarakat agropolitan.
14. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang manajemen pengelolaan potensi ekonomi lokal, serta fasilitasi bimbingan teknis peningkatan kualitas dan kuantitas produk agropolitan dengan pengembangan desain kemasan, jaringan pemasaran, dan kemudahan izin usaha.
15. Peningkatan dan perluasan koordinasi, kerja sama, dan keterlibatan lintas instansi yang terkait dalam pengembangan kawasan agropolitan untuk menghindari parsialitas pengembangan agropolitan, serta penyamaan persepsi pengertian, model, dan operasionalisasi pengembangan kawasan agropolitan.
16. Pengembangan jaringan kerja sama dan kemitraan usaha dengan LSM dan perguruan tinggi dalam bidang ekonomi produktif dan pendampingan kelompok-kelompok usaha ekonomi kawasan agropolitan.

e. Program

**e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**

Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dan perkebunan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan nasional, serta meningkatkan ekspor non-migas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Peningkatan produksi, produktivitas, mutu hasil pertanian dan perkebunan
2. Peningkatan kualitas bibit/benih, kapasitas produksi, dan pengembangan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi dan berdaya saing tinggi.
3. Peningkatan produksi gula melalui penyediaan bibit tebu unggul, bongkar *ratoon*, dan penanganan pasca-panen.
4. Peningkatan kualitas tembakau sesuai standar industri dan kualitas ekspor, melalui peningkatan kualitas bibit, perbaikan sistim budi daya, dan pengelolaan pasca-panen.
5. Pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit.

**f. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Hewan Lainnya**

Program ini bertujuan meningkatkan produksi hasil peternakan dan hewan lainnya, untuk meningkatkan ketersediaan bahan pangan asal hewan dari dalam negeri yang aman dan sehat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Peningkatan ketersediaan pangan hasil ternak melalui peningkatan populasi ternak, produksi hasil ternak yang aman sehat, utuh, dan halal.
2. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dan hewan lainnya.

**g. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan**

Program ini bertujuan mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya perikanan secara optimal, adil, dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, dan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan serta masyarakat pesisir lainnya.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Peningkatan usaha perikanan skala kecil, termasuk di pulau-pulau kecil yang potensial dan peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah produk perikanan
2. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar serta percepatan dan penataan kembali usaha budidaya tambak dan air tawar.

h. Program

#### **h. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**

Program ini bertujuan memfasilitasi kemitraan antara nelayan dan pengusaha, pengelolaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil terpadu dan penguatan modal usaha masyarakat pesisir skala kecil melalui peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah produk perikanan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui peningkatan pemasaran, standar mutu dan nilai tambah produk perikanan.
2. Pengelolaan jasa lingkungan dan kelautan.

#### **i. Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

Program ini bertujuan memfasilitasi kebutuhan nelayan dengan mengupayakan ketersediaan pelabuhan perikanan dengan kualitas dan kuantitas yang memadai dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan secara bertanggung jawab.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan serta percepatan dan penataan kembali usaha budidaya tambak dan air tawar.
2. Pembangunan dan pengembangan fasilitas untuk memperpanjang lama waktu nelayan melaut, antara lain pembangunan SPBU terapung, perlengkapan *cold storage* pada perahu penangkap ikan.

#### **j. Program Pengembangan Budidaya Perikanan**

Program ini bertujuan mendorong upaya-upaya pengembangan kawasan dan sentra budidaya untuk menjembatani akses kemitraan pembudidaya ke *stakeholder* yang lain.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Peningkatan produksi perikanan budidaya melalui intensifikasi, diversifikasi, dan ekstensifikasi usaha perikanan.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan, serta sistem perbenihan dan pengembangan sistem sertifikasi balai benih serta lahan budidaya.
3. Penerapan *good agriculture practices* (GAP), *good hatchery practices* (GHP), dan sistem jaminan mutu berdasarkan *hazard analysis critical control point* (HACCP) budidaya.
4. Pengendalian hama penyakit ikan, dan peningkatan kualitas lingkungan.

#### **k. Program**

**k. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan**

Program ini bertujuan memfasilitasi UMKM berupa sarana usaha dan pemasaran hasil perikanan, perbaikan sanitasi dan higienis, pengembangan produk bernilai tambah dan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Pembinaan dan pengembangan jaringan usaha dan pemasaran hasil perikanan.
2. Pengembangan pemasaran dalam dan luar negeri, serta ekspor hasil perikanan.
3. Peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan hasil perikanan.

**XI.4.2 Program Penunjang**

**a. Program Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Kehutanan**

Program ini bertujuan meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya hutan, secara efisien, optimal, adil dan berkelanjutan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Pengembangan hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan.
3. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup di sekitar hutan, dalam pengembangan hutan tanaman yang lestari.
4. Penegakan hukum terhadap kegiatan penebangan liar/ilegal.
5. Pemberdayaan masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar hutan.

**b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan/Peternakan**

Program ini bertujuan meningkatkan dan mengembangkan penerapan teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas serta efisiensi usaha melalui peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia, serta penguatan lembaga pendukungnya untuk meningkatkan posisi tawar petani.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian, pengembangan riset pertanian dan pengembangan serta pemanfaatan teknologi tepat guna, dan spesifik lokasi yang ramah lingkungan.

2. Peningkatan



2. Peningkatan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian, yaitu petani, nelayan, penyuluh, dan aparat pembina dan penguatan lembaga pendukungnya, untuk meningkatkan posisi tawar petani.

**c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan**

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat pertanian, terutama petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumber daya usaha pertanian.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Peningkatan distribusi pangan, melalui penguatan kapasitas kelembagaan pangan, dan peningkatan infrastruktur pertanian dan pedesaan yang mendukung sistem distribusi pangan.
2. Stabilisasi harga produksi pertanian dan pengembangan produk turunannya serta penciptaan pasar untuk mendorong perluasan lapangan kerja.
3. Pengembangan jejaring perdagangan dan agrobisnis untuk mendorong pengembangan pasar yang efisien dan berkeadilan bagi produk-produk pertanian dan produk unggulan yang dihasilkan.
4. Promosi dan pengembangan pemasaran produk pertanian , perkebunan dan peternakan.
5. Fasilitasi perdagangan antar-wilayah, dan perlindungan petani dari sistem perdagangan tidak adil.

**d. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan**

Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan/kualitas sumber daya manusia pertanian (aparatur, petani, peternak, petambak dan nelayan) melalui optimalisasi pendampingan bagi petani, peternak, nelayan, dan pembudidaya ikan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Revitalisasi sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, dengan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
2. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia petani/peternak/nelayan, dan penguatan lembaga pendukungnya diarahkan untuk revitalisasi penyuluhan dan pendampingan peternak.